

APLIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN BANDUNG

PUBLIC INFORMATION OPENNESS APPLICATION OF KABUPATEN BANDUNG

Erliana¹, Wawa Wikusna², Wahyu Hidayat³

¹²³Prodi D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom
email: ¹erlianasrgt@gmail.com ²wawa_wikusna@tass.telkomuniversity.ac.id
³wahyuhidayat@tass.telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah undang-undang yang mewajibkan badan publik untuk menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi publik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat. Terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdapat pada setiap badan publik untuk mengelola informasi publik. Pemohon informasi publik dan masyarakat meminta informasi publik dengan mendatangi badan publik yang bersangkutan. Namun dengan perkembangan teknologi yang didukung oleh pemerintah, kini banyak badan publik yang telah memiliki *website* atau aplikasi khusus untuk menampilkan informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini memiliki fitur KIP yang masih tergabung dengan *website* Pemerintah Kabupaten Bandung (www.bandungkab.go.id). Fitur tersebut dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung yang menjadi studi kasus pembuatan proyek akhir ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Darmawan, selaku Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*, dengan tergabungnya fitur KIP pada *website* pemerintah, pengelolaan isi informasi publik tidak terpusat dan kurang leluasa dan beberapa fitur lain yang belum lengkap, sehingga akan dibangun aplikasi KIP Kabupaten Bandung yang terpisah dari *website* Pemerintah Kabupaten Bandung serta memiliki fitur lebih lengkap.

Pembangunan aplikasi KIP Kabupaten Bandung menggunakan *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan metode Waterfall. *Tools* pemodelan yang digunakan adalah *use case* dan ER-D. Sementara *tools* pembangunan aplikasi menggunakan PHP dan HTML sebagai bahasa pemrograman, XAMPP sebagai *web server*, dan MySQL sebagai *database*.

Kata Kunci: KIP, PPID, Kabupaten Bandung, Aplikasi

Abstract

Based on Law Number 14 of 2008 in Indonesia, Public Information Openness is a law that requires public institutions to deliver public information to applicants for public information, except for excluded information. Public information divided into three categories, there are Berkala, Serta Merta, and Setiap Saat. There is an Information and Documentation

Management Officer in every public institutions to manage public information. Applicants for public information and the public can request public information by visiting the relevant public body. But with the development of technology supported by the government now, many public institutions have websites or applications to display the public information.

Kabupaten Bandung Government currently has a KIP feature that is still included into the Kabupaten Bandung Government website (www.bandungkab.go.id). This feature is managed by Diskominfo of Kabupaten Bandung, which also as case study for making this final project. Based on interviews with Pak Budi Darmawan, as the Head of the E-Government Governance Section, with KIP features insides the government websites, the management of public information content was not centralized and less flexible also several other features were incomplete, so there will be the development of Kabupaten Bandung KIP application that will separated from the Kabupaten Bandung Government website and has more complete features.

The development of Kabupaten Bandung KIP application uses Software Development Life Cycle (SDLC) with the Waterfall method. The modeling tools used are use case and ER-D. While the application development tools uses PHP and HTML as programming languages, XAMPP as a web server, and MySQL as a database.

Keywords: *Public Information Openness, Application*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Diskominfo (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik) Kabupaten Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bandung. Di dalam organisasinya, terdapat divisi *e-government* yang memiliki salah satu tugas pokok, yaitu mengembangkan dan mengelola aplikasi terkait pemerintahan Kabupaten Bandung. Saat ini terdapat beberapa aplikasi yang butuh dikembangkan, salah satunya adalah aplikasi mengenai keterbukaan informasi publik Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Darmawan, selaku Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* (kutipan terlampir pada Lampiran 2), saat ini keterbukaan informasi publik masih berupa fitur yang tergabung dalam web Pemerintah Kabupaten Bandung (www.bandungkab.go.id). Akibatnya, pengelolaan isi informasi publik tidak terpusat pada satu aplikasi, dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang terbagi menjadi PPID Utama dan PPID Pembantu (berisi perangkat daerah) selaku pengelola informasi publik kurang leluasa untuk mengelola informasi publik secara *online*.

Oleh karena itu, dalam Proyek Akhir ini dibangun sebuah Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh PPID Utama dan PPID Pembantu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada sub Bab Latar Belakang, terdapat masalah yang diangkat dalam Proyek Akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimana memfasilitasi PPID Pembantu dalam memublikasikan informasi publik tanpa perlu mendatangi admin web Pemerintah Kabupaten Bandung dan pengguna dapat melihat informasi publik berdasarkan kategori?
2. Bagaimana memfasilitasi masyarakat agar dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID tanpa perlu mendatangi langsung instansi PPID terkait untuk mengisi formulir permohonan, serta masyarakat dapat mengetahui sejauh mana permohonan mereka diproses berdasarkan disposisi permohonan yang dilakukan oleh PPID?
3. Bagaimana memfasilitasi masyarakat agar dapat mengetahui kegiatan dan berita terkini terkait informasi publik?

1.3 Tujuan

Untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah yang telah dipaparkan pada sub Bab Rumusan Masalah, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membangun sebuah Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bandung yang dapat:

1. Memfasilitasi PPID Pembantu dalam memublikasikan informasi publik tanpa perlu mendatangi admin web Pemerintah Kabupaten Bandung dan pengguna dapat melihat informasi publik berdasarkan kategori.

2. Memfasilitasi masyarakat agar dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID tanpa perlu mendatangi langsung instansi PPID terkait untuk mengisi formulir permohonan, serta masyarakat dapat mengetahui sejauh mana permohonan mereka diproses berdasarkan disposisi permohonan yang dilakukan oleh PPID.
3. Memfasilitasi masyarakat agar dapat mengetahui kegiatan dan berita terkini terkait informasi publik.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam Proyek Akhir ini tidak meluas dan melenceng dari tujuan, maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut.

1. Aplikasi dikembangkan untuk digunakan oleh lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung dan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik.
2. Informasi Publik yang Dikecualikan, Pengajuan Keberatan terhadap Permohonan, dan Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik tidak akan dibahas dalam buku ini.
3. Berdasarkan fitur Profil Perangkat Daerah pada web Pemerintah Kabupaten Bandung, PPID Pembantu terdapat dalam masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terdiri dari Inspektorat, 12 Bagian (Sekretariat Daerah), Sekretariat DPRD, 21 Dinas, 7 Badan (termasuk Satpol PP), 31 RSUD

(Rumah Sakit Umum Daerah), 31 Kecamatan.

4. *Dummy* akun PPID Pembantu yang terdapat pada aplikasi berjumlah enam perangkat daerah.
5. PPID Utama berada di Diskominfo (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik) Kabupaten Bandung, namun Diskominfo juga memiliki PPID Pembantu dengan penanggung jawab berbeda dengan PPID Utama.
6. Aplikasi KIP Kabupaten Bandung tidak menyediakan fitur *chat* antarPPID dalam aplikasi.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat pernyataan bahwa "informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan publik" [1].

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas berupa menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberi pelayanan informasi di Badan Publik. Warga negara dan/atau badan hukum Indonesia selaku pemohon informasi publik dapat melihat dan mengajukan permohonan informasi publik yang diatur dalam undang-undang ini [1].

2.2 Kategori Informasi Publik

Informasi publik memiliki tiga jenis kategori berdasarkan periode publikasi, yaitu secara berkala, serta merta, dan setiap saat. Penjelasan dari ketiga kategori dijelaskan sebagai berikut [1].

1. Informasi publik secara Berkala, meliputi informasi mengenai Program dan Kegiatan, informasi terkait Kinerja, Laporan Keuangan, Laporan dan Prosedur Akses Informasi, Pengadaan Barang dan Jasa, Hasil Penelitian, dan Regulasi.
2. Informasi publik secara Serta Merta, meliputi informasi yang dapat mengancam nyawa dan ketertiban masyarakat seperti Informasi Darurat.
3. Informasi publik yang tersedia Setiap Saat, meliputi Profil Badan Publik, dan Pengaduan dan Pelanggaran.

2.3 Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik. Pengajuan permohonan informasi publik di proses paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, waktu proses dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi PPID. Adapun daftar informasi publik yang dapat diajukan sebagai berikut [1].

- a. Informasi tentang profil badan publik; informasi kedudukan atau domisili, struktur organisasi.
- b. Informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan; nama program, pelaksanaan program, capaian program, jadwal pelaksanaan

program, anggaran program, agenda terkait pelaksanaan tugas badan publik, informasi yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat, informasi penerimaan calon pegawai dan pejabat badan publik, informasi penerimaan calon peserta didik pada badan publik untuk umum.


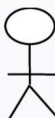


- c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik.
- d. Informasi tentang laporan keuangan meliputi; rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, catatan laporan keuangan, daftar aset dan investasi.
- e. Akses informasi publik terdiri atas; jumlah permohonan informasi publik diterima, waktu pemenuhan setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak, alasan penolakan permohonan informasi publik.
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan yang mengikat atau berdampak bagi publik.
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik.
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat publik atau pihak yang mendapat izin dari badan publik.
- i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.

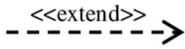
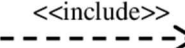
2.4 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah diagram yang bersifat statis dan menggambarkan

kumpulan *use case* dan *actor*. *Use Case Diagram* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang tersedia di dalam sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut [2]. Dalam membuat *Use Case Diagram*, terdapat simbol-simbol yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2-1 *Use Case Diagram*

SIMBOL	DESKRIPSI
	Diisi dengan nama fungsionalitas yang diikuti kata kerja di awal penamaan <i>use case</i> ; unit yang berhubungan dengan aktor atau antarunit.
	Mewakili orang, proses, atau benda yang berinteraksi dengan sistem informasi (interaksi di luar sistem). Penamaan dengan kata benda.
	Garis yang mewakili interaksi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> atau sebaliknya.
	Menambahkan relasi <i>use case</i> kepada <i>use</i>

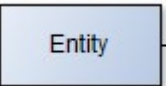



	<p>case tambahan, namun use case utama tetap berfungsi jika tanpa use case tambahan.</p>
<p>Include</p> 	<p>Menambahkan relasi use case dengan use case tambahan yang diperlukan untuk menjalankan use case utama.</p>



Pada tabel 2-1, terdapat lima simbol yang digunakan dalam pembuatan Use Case Diagram beserta deskripsi yang menjelaskan makna atau fungsi dari masing-masing simbol.

2.5 ER-D

ER-D (Entity Relationship Diagram) merupakan sekumpulan alat yang membantu mendeskripsikan data-data atau objek apa saja yang dibuat. Data-data dibuat berdasarkan dunia nyata yang disebut entitas, dan masing-masing entitas memiliki hubungan [3]. Penjelasan mengenai simbol yang digunakan dalam membuat ER-D digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2 - 2
Tabel Simbol ER-D

SIMBOL	DESKRIPSI
<p>Entity</p> 	<p>Diisi dengan nama tabel yang dibutuhkan untuk membuat sistem aplikasi</p>
<p>Primary Key</p> 	<p>Diisi dengan primary key dari entity</p>
<p>Attribute</p> 	<p>Diisi dengan nama kolom yang perlu disimpan (umum)</p>
<p>Multivalue</p> 	<p>Diisi dengan nama kolom tabel yang dapat memiliki lebih dari satu nilai data</p>
SIMBOL	DESKRIPSI

<p><i>Relationship</i></p> 	<p>Menghubunugka n antar-relasi, diisi dengan kata kerja.</p>
<p><i>Association Multiplicity</i></p> 	<p>Garis yang merelasikan <i>entity</i> dan <i>attribute</i>, disertai <i>multiplicity</i> pada masing-masing ujung garis.</p>

Pada tabel 2-2, terdapat 11 simbol yang digunakan dalam pembuatan ER-D beserta deskripsi yang menjelaskan makna atau fungsi dari masing-masing simbol.

3. Analisis dan Perancangan

3.1 Analisis Fungsionalitas

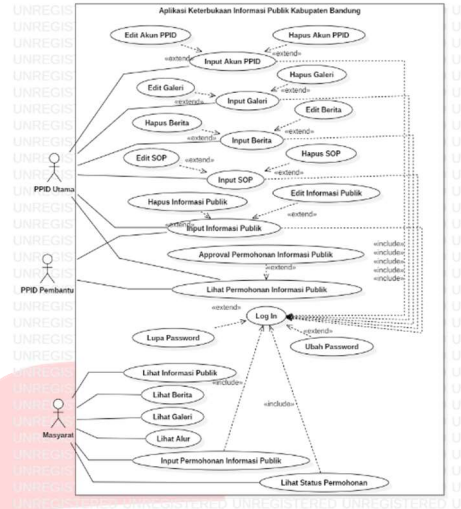
Aplikasi KIP Kabupaten Bandung memiliki tiga pengguna, yaitu PPID Utama (admin), PPID Pembantu (Perangkat Daerah), dan Masyarakat. Penjabaran mengenai hak akses sebagai berikut.

Tabel 3- 1 Tabel Analisis Fungsionalitas

Fungsionalitas	USER		
	PPID Utama	PPID Pembantu	Masyarakat
Log In	V	V	V
Lupa Password	V	V	V
Ubah Password	V	V	V
Akun PPID			
Input Akun PPID	V		
Edit Akun PPID	V		

Hapus Akun PPID	V		
Lihat Akun PPID	V		
Galeri			
Input Galeri	V		
Edit Galeri	V		
Hapus Galeri	V		
Lihat Galeri	V	V	V
Berita			
Input Berita	V		
Edit Berita	V		
Hapus Berita	V		
Lihat Berita	V	V	V
SOP			
Input SOP	V		
Edit SOP	V		
Fungsionalitas	USER		
	PPID Utama	PPID Pembantu	Masyarakat
Hapus SOP	V		
Informasi Publik			
Input Informasi Publik	V	V	
Edit Informasi Publik	V	V	
Hapus Informasi Publik	V	V	
Lihat Informasi Publik	V	V	V
Permohonan Informasi Publik			
Input Permohonan			V

Informasi Publik			
Lihat Permohonan Informasi Publik	V	V	
Lihat Status Permohonan Informasi Publik			V
Approval Permohonan Informasi Publik	V		
Log Out	V	V	V



Gambar 3- 1 Use Case Digaram

Terdapat delapan fungsionalitas utama pada aplikasi ini yang telah disesuaikan dengan hak akses pengguna aplikasi.

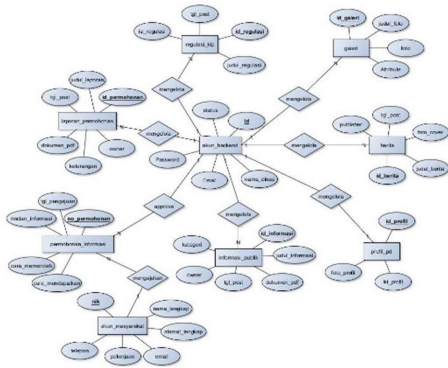
3.2 Use Case Diagram

Pada Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bandung terdapat empat user, yaitu admin, operator, perangkat daerah, dan masyarakat. Fungsionalitas yang dapat diakses masing-masing user akan dijelaskan melalui use case diagram berikut.

Berdasarkan use case diagram di atas, terdapat tiga user dengan masing-masing fungsionalitas. PPID Utama memiliki hak akses untuk mengelola akun PPID Pembantu dan mengelola data master lainnya, serta melihat dan melakukan approval permohonan informasi online yang telah diajukan oleh masyarakat bersama dengan hak akses PPID Pembantu. Masyarakat dapat melihat informasi publik, berita, galeri, alur SOP, dan dapat mengajukan permohonan informasi publik.

3.3 ER-D

Terdapat ERD untuk Aplikasi KIP Kabupaten Bandung digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3- 2 ER-D

Berdasarkan gambar 3-13, ERD terdiri dari sembilan entitas, yaitu akun_backend, akun_masyarakat, informasi_public, profil_pd, permohonan_informasi, laporan_permohonan, galeri, berita, dan regulasi_kip.

4. Implementasi

4.1 Implementasi Aplikasi

Implementasi dari pembangunan aplikasi KIP Kabupaten Bandung digambarkan sebagai berikut.

4.1.1 Halaman Login PPID

Halaman Log In PPID digambarkan sebagai berikut.

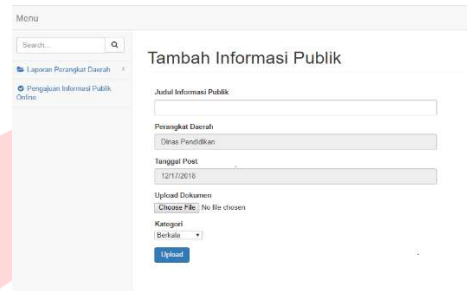


Gambar 3- 3 Halaman Login PPID

Pada halaman *login*, terdapat form untuk mengisi *email* dan *password* yang telah terdaftar pada *database*.

4.1.2 Halaman Input Informasi Publik

Halaman Input Informasi Publik digambarkan sebagai berikut.

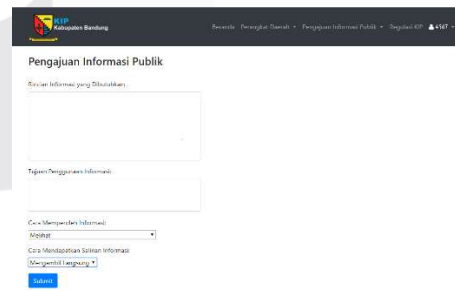


Gambar 3- 4 Halaman Input Informasi Publik

Pada halaman *input* Informasi Publik, terdapat kolom yang wajib diisi, yaitu judul informasi publik, unggah dokumen, dan kategori informasi publik.

4.1.3 Halaman Input Permohonan Informasi Publik

Halaman Input Permohonan Informasi Publik digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3- 5 Halaman Input Permohonan Informasi Publik

Pada halaman *input* Pengajuan Informasi Publik, terdapat kolom yang wajib diisi, yaitu rincian informasi, tujuan

penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan cara mendapatkan salinan informasi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembangunan aplikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bandung, terdapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Aplikasi KIP Kabupaten Bandung dapat memfasilitasi proses *input* informasi publik kepada setiap Perangkat Daerah tanpa perlu mendatangi Diskominfo Kabupaten Bandung dan pengguna dapat melihat informasi publik berdasarkan kategori.
2. Aplikasi KIP Kabupaten Bandung dapat memfasilitasi proses pengajuan permohonan informasi publik kepada masyarakat tanpa perlu datang langsung ke PPID Utama untuk mengisi formulir, serta dapat mengetahui sejauh mana permohonan mereka diproses berdasarkan disposisi permohonan yang dilakukan oleh PPID.
3. Aplikasi KIP Kabupaten Bandung dapat memfasilitasi masyarakat agar dapat

mengetahui kegiatan, berita, dan peraturan yang berlaku mengenai informasi publik.

5.2 Saran

Terdapat saran untuk pengembangan lanjutan pada aplikasi KIP Kabupaten Bandung sebagai berikut.

1. Terdapat fitur informasi publik yang paling sering dilihat.
2. Terdapat fitur untuk melihat informasi publik yang baru saja dipublikasi.

Daftar Pustaka

- [1] Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- [2] B. Nugroho, Aplikasi Sistem Pakar dengan PHP & Editor Dreamweaver, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- [3] Doro Edi dan S. Betshani, Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse, Jurnal Informatika, 2009.